



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang/3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

22. Peraturan/4

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 Nomor 1);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4 - 4479 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025;
32. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/539/SJ Perihal Pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada APBD Tahun Anggaran 2025;

33. Peraturan/5

33. Peraturan Gubernur Papua Nomor 77 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 Nomor 46);
34. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.2.775.925.071.404,00 bertambah sejumlah Rp.157.481.415.778,23 sehingga menjadi Rp.2.933.406.487.182,23 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp2.580.517.519.866,00 |
| b. Berkurang | (Rp 172.195.104.860,57) |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp2.408.322.415.005,43 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp2.765.925.071.404,00 |
| b. Bertambah | Rp 167.481.415.778,23 |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp2.933.406.487.182,23 |
| Defisit setelah perubahan | (Rp 523.084.072.176,80) |
| 3. Pembiayaan | /6 |

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	195.407.551.538,00
2) Bertambah	Rp	<u>329.676.520.638,80</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	525.084.072.176,80

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Berkurang	(Rp	<u>10.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	<u>525.084.072.176,80</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	515.406.169.254,00
2) Bertambah	Rp	<u>21.196.522.915,43</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	536.602.692.169,43

b. Dana Transfer

1) Semula	Rp	2.064.061.350.612,00
2) Berkurang	(Rp	<u>223.983.802.510,00)</u>
Jumlah dana transfer setelah perubahan	Rp	1.840.077.548.102,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	1.050.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>30.592.174.734,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	31.642.174.734,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	309.296.000.000,00
2) Berkurang	(Rp	<u>10.487.829.000,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	298.808.171.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	135.666.617.000,00
2) Berkurang	(Rp	<u>111.107.669.885,57)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	24.558.947.114,43

c. Hasil/7

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 55.664.802.254,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 10.435.197.746,00</u> |
| Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 66.100.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp 14.778.750.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 132.356.824.055,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp 147.135.574.055,00 |
- (3) Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Transfer Umum
- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 869.964.845.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp 172.406.390.000,00)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 697.558.455.000,00 |
- b. Dana Transfer Khusus
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 132.287.191.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp 90.158.310.000,00)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 42.128.881.000,00 |
- c. Dana Otonomi Khusus
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 547.110.973.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp 19.202.007.000,00)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 527.908.966.000,00 |
- d. Dana Tambahan Infrastruktur
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 371.391.227.900,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 371.391.227.900,00 |
- e. Dana Transfer Antar Pemerintah Daerah
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 143.307.113.712,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 57.782.904.490,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 201.090.018.202,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- Pendapatan Hibah
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.050.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 30.592.174.734,00</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 31.642.174.734,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp 2.147.048.958.843,69
2) Bertambah	<u>Rp 330.868.986.861,54</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.477.917.945.705,23

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp 471.386.467.634,00
2) Berkurang	<u>(Rp 144.681.208.157,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 326.705.259.477,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp 9.206.362.926,31
2) Berkurang	<u>(Rp 7.706.362.926,31)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.500.000.000,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp 138.283.282.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp 11.000.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 127.283.282.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp 864.174.672.631,03
2) Bertambah	<u>Rp 45.541.990.163,26</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 909.716.662.794,29

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp 1.251.616.029.522,66
2) Bertambah	<u>Rp 182.139.910.322,28</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.433.755.939.844,94

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp 24.949.354.335,00
2) Bertambah	<u>Rp 102.882.766.429,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 127.832.120.764,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp 6.308.902.355,00
2) Bertambah	<u>Rp 304.319.947,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 6.613.222.302,00

(3) Belanja/9

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp 650.000.000,00
2) Berkurang	(Rp 400.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 250.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp 92.305.134.140,00
2) Bertambah	Rp 8.445.583.707,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 100.750.717.847,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp 83.983.282.117,21
2) Berkurang	(Rp 6.188.319.441,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 77.794.962.676,21

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula	Rp 292.371.597.736,79
2) Berkurang	(Rp 146.491.018.783,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 145.880.578.953,79

e. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp 76.453.640,00
2) Berkurang	(Rp 47.453.640,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 29.000.000,00

f. Belanja Modal Asset Lainnya

1) Semula	Rp 2.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.000.000.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis belanja :

Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp 9.206.362.926,31
2) Berkurang	(Rp 7.706.362.926,31)
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.500.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp 138.283.282.000,00
2) Berkurang	(Rp 11.000.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 127.283.282.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :
- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 195.407.551.538,00
 - 2) Bertambah Rp 329.676.520.638,80
 - Jumlah setelah perubahan Rp 525.084.072.176,80
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 10.000.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp 10.000.000.000,00)
 - Jumlah setelah perubahan Rp 0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp 195.407.551.538,00
 - 2) Bertambah Rp 285.676.520.638,80
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 481.084.072.176,80
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 44.000.000.000,00
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 44.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- Penyertaan modal pada PT. Bank Papua
- 1) Semula Rp 10.000.000.000,00
 - 2) Berkurang (Rp 10.000.000.000,00)
 - Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
MATHIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H
KOMJEN POL (Purn)

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 21 Oktober 2025

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

SUZANA D. WANGGAI., S.Pd., MSocSc
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (4 - 184/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



PROVINSI PAPUA

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	515.406.169.254,00	536.602.692.169,43	21.196.522.915,43
4.1.01	Pajak Daerah	309.296.000.000,00	298.808.171.000,00	-10.487.829.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	135.666.617.000,00	24.558.947.114,43	-111.107.669.885,57
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.664.802.254,00	66.100.000.000,00	10.435.197.746,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.778.750.000,00	147.135.574.055,00	132.356.824.055,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.064.061.350.612,00	1.840.077.548.102,00	-223.983.802.510,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.920.754.236.900,00	1.638.987.529.900,00	-281.766.707.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	143.307.113.712,00	201.090.018.202,00	57.782.904.490,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.050.000.000,00	31.642.174.734,00	30.592.174.734,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.050.000.000,00	31.642.174.734,00	30.592.174.734,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.580.517.519.866,00	2.408.322.415.005,43	-172.195.104.860,57
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.147.048.958.843,69	2.477.917.945.705,23	330.868.986.861,54
5.1.01	Belanja Pegawai	864.174.672.631,03	909.716.662.794,29	45.541.990.163,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.251.616.029.522,66	1.433.755.939.844,94	182.139.910.322,28
5.1.05	Belanja Hibah	24.949.354.335,00	127.832.120.764,00	102.882.766.429,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.308.902.355,00	6.613.222.302,00	304.319.947,00
5.2	BELANJA MODAL	471.386.467.634,00	326.705.259.477,00	-144.681.208.157,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	650.000.000,00	250.000.000,00	-400.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.305.134.140,00	100.750.717.847,00	8.445.583.707,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.983.282.117,21	77.794.962.676,21	-6.188.319.441,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	292.371.597.736,79	145.880.578.953,79	-146.491.018.783,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	76.453.640,00	29.000.000,00	-47.453.640,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.206.362.926,31	1.500.000.000,00	-7.706.362.926,31
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.206.362.926,31	1.500.000.000,00	-7.706.362.926,31
5.4	BELANJA TRANSFER	138.283.282.000,00	127.283.282.000,00	-11.000.000.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	138.283.282.000,00	127.283.282.000,00	-11.000.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.765.925.071.404,00	2.933.406.487.182,23	167.481.415.778,23
	Total Surplus/(Defisit)	-185.407.551.538,00	-525.084.072.176,80	-339.676.520.638,80
6	PEMBIAYAAN DAERAH			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	195.407.551.538,00	525.084.072.176,80	329.676.520.638,80
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	195.407.551.538,00	481.084.072.176,80	285.676.520.638,80
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	44.000.000.000,00	44.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	0,00	-10.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	0,00	-10.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	0,00	-10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	185.407.551.538,00	525.084.072.176,80	339.676.520.638,80
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Provinsi Papua, 20 Oktober 2025

Gubernur


MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H.
KOMJEN POL (Purn)



PROVINSI PAPUA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran II : Peraturan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

Kode		Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Operasi				Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang ⁹
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	121.300.000.000,00	128.117.886.182,43	899.684.866.338,20	919.249.014.705,20	299.865.719.270,0	159.358.388.862,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.550.585.608,20	1.078.607.403.567,20	-120.943.182.041,00
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	0,00	265.663.038.226,00	312.199.465.241,17	3.009.842.320,00	3.643.242.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.672.880.546,00	315.842.707.561,17	47.169.827.015,17
1	01	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	265.663.038.226,00	312.199.465.241,17	3.009.842.320,00	3.643.242.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.672.880.546,00	315.842.707.561,17	47.169.827.015,17
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	121.300.000.000,00	128.117.886.182,43	374.565.936.694,20	388.032.732.247,20	21.416.245.200,00	21.747.375.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.982.181.894,20	389.780.107.447,20	-6.202.074.447,00
1	02	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	191.014.522.471,20	185.483.385.024,20	773.695.200,00	604.825.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.788.217.671,20	186.088.210.224,20	-5.700.007.447,00
1	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA	78.000.000.000,00	81.393.074.667,83	110.607.931.723,00	109.107.931.723,00	17.102.550.000,00	17.602.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.710.481.723,00	126.710.481.723,00	-1.000.000.000,00
1	02	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEUPURA	35.000.000.000,00	38.424.811.514,60	54.766.097.000,00	54.266.030.000,00	3.540.000.000,00	3.540.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.306.097.000,00	57.806.030.000,00	-500.067.000,00
1	02	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEUPURA	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00	15.102.235.500,00	16.100.235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102.235.500,00	16.100.235.500,00	998.000.000,00
1	02	RUMAH SAKIT KHUSUS ABEUPURA	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00	3.075.150.000,00	3.075.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.150.000,00	3.075.150.000,00	0,00
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	192.564.486.181,00	174.323.113.360,00	274.658.459.000,0	133.212.200.217,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.222.945.181,00	307.535.313.577,00	-159.687.631.604,00
1	03	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	182.564.486.181,00	171.003.865.360,00	274.658.459.000,0	133.212.200.217,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.222.945.181,00	304.216.065.577,00	-153.006.879.604,00
1	03	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	10.000.000.000,00	3.319.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	3.319.248.000,00	-6.680.752.000,00
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	44.255.264.563,00	42.799.809.589,43	417.615.000,00	401.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.672.879.563,00	43.201.774.599,43	-1.471.104.963,57
1	05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	0,00	29.876.868.137,00	28.327.357.957,00	407.395.000,00	391.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.284.263.137,00	28.718.752.957,00	-1.565.510.180,00

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang ^g
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
5 06	BADAN PENGELOLA PERASAKAN DAN KERUASMAN	0,00	0,00	14.207.900.219,00	14.096.606.811,00	21.867.000,00	21.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.229.767.219,00	14.096.473.811,00	-139.293.408,00
5 07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG	0,00	0,00	10.957.097.757,00	10.888.940.932,00	247.000.000,00	106.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204.097.757,00	10.795.490.932,00	-408.606.825,00
5 07	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	0,00	0,00	10.957.097.757,00	10.888.940.932,00	247.000.000,00	106.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204.097.757,00	10.795.490.932,00	-408.606.825,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	31.653.062.105,00	33.493.816.383,00	188.901.800,00	19.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.841.963.905,00	33.513.666.383,00	1.671.702.478,00
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	31.653.062.105,00	33.493.816.383,00	188.901.800,00	19.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.841.963.905,00	33.513.666.383,00	1.671.702.478,00
6 01	INSPEKTORAT	0,00	0,00	31.653.062.105,00	33.493.816.383,00	188.901.800,00	19.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.841.963.905,00	33.513.666.383,00	1.671.702.478,00
6	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	26.813.242.672,00	133.200.237.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.813.242.672,00	133.200.237.662,00	106.386.994.990,00
6 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	26.813.242.672,00	133.200.237.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.813.242.672,00	133.200.237.662,00	106.386.994.990,00
6 01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	26.813.242.672,00	133.200.237.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.813.242.672,00	133.200.237.662,00	106.386.994.990,00
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAMAN	0,00	0,00	78.725.250.706,00	78.972.002.706,00	150.796.800,00	453.196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.876.047.506,00	79.425.199.506,00	549.152.000,00
9 02	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	0,00	0,00	78.725.250.706,00	78.972.002.706,00	150.796.800,00	453.196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.876.047.506,00	79.425.199.506,00	549.152.000,00
9 02	TOTAL	2.584.867.519.866,00	2.412.472.415.005,43	2.147.048.958.843,69	2.477.917.946.705,23	471.386.467.634,00	326.705.239.477,00	9.206.362.926,31	1.500.000.000,00	138.283.282.000,00	127.283.282.000,00	2.765.925.071.404,00	2.933.406.487.182,23	167.481.415.778,23

Provinsi Papua, 20 Oktober 2025

Gubernur


MATUS D. FAKIH, S.N.K., M.H.
KOMJEN POL (Purn)



PROVINSI PAPUA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.580.517.519.866,00	2.408.322.415.005,43	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	515.406.169.254,00	536.602.692.169,43	
4.1.01	Pajak Daerah	309.296.000.000,00	298.808.171.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	135.666.617.000,00	24.558.947.114,43	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.664.802.254,00	66.100.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.778.750.000,00	147.135.574.055,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.064.061.350.612,00	1.840.077.548.102,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.920.754.236.900,00	1.638.987.529.900,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	143.307.113.712,00	201.090.018.202,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.050.000.000,00	31.642.174.734,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.050.000.000,00	31.642.174.734,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN			
Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.036.134.000,00	1.036.134.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 9.02.02.3.02.0011 Monitoring Pemberdayaan Perempuan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 9.02.02.3.02.0012 Peningkatan Kapasitas MRP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	450.000.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	195.407.551.538,00	525.084.072.176,80	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	195.407.551.538,00	481.084.072.176,80	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	44.000.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	0,00	

Provinsi Papua, 20 Oktober 2025

Gubernur


MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H.
KOMJEN POL (Purn)



REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BERSERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BERSERTA SUB KELUARAN
PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran IV : Perkiraan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																
Pagu Indikatir Belanja (Rp)																
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana	
					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DINAS PENDIDIKAN																
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1.01																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
1.01.01																
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
1.01.01.1.01																
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
1	1.01.01.1.01.0001															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.036.134.000,00	1.036.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.134.000,00	1.036.134.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
2	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	151.500.000,00	116.393.000,00	46.100.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	199.893.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
3	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
4	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	500.205.000,00	500.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.205.000,00	500.205.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-												
5	1.01.01.1.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	652 Orang/Bulan	47.646.501.509,00	46.646.501.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.646.501.509,00	46.646.501.509,00	DAK Non Fisik-TPG PMSD Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Hiburan Khusus 1,25%-Pegaw-Pendidikan Dana Alokasi Umum (DAU)	
6	1.01.01.1.02.0002	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	238.900.000,00	238.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.900.000,00	238.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU)	
7	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan																	
No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikator Belanja (Rp)												Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total				
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5												16	
1843	9.02.02.3.02.0008	Pelaksanaan Kewajiban Masyarakat Kelurahan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kewajiban Masyarakat Kelurahan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1844	9.02.02.3.02.0008	Monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelaksanaan Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	1 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua [BLOCK GRANT] Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua [BLOCK GRANT]	
1845	9.02.02.3.02.0010	Monitoring Kehidupan Beragama	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kehidupan Beragama	1 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua [BLOCK GRANT] Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua [BLOCK GRANT]	
1846	9.02.02.3.02.0011	Monitoring Pembudayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pembudayaan Perempuan	1 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua [BLOCK GRANT] Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua [BLOCK GRANT]	
1847	9.02.02.3.02.0012	Peningkatan Kapasitas MRP	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP	1 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua [BLOCK GRANT] Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua [BLOCK GRANT]	

Provinsi Papua, 20 Oktober 2025

Gubernur
MATIUS D. FAKHRI, S.I.K., M.H.
KOMJEN POL. (Purn)



PROVINSI PAPUA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

Kode		Uraian	Kelompok Belanja										Jumlah	
			Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer					
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1		PELAYANAN UMUM												
1	01	Pendidikan	54.770.283,50 9,00	54.733.775,50 9,00	48.100.000,0 0	81.500.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	54.818.383,50 9,00	54.815.275,50 9,00		
1	01	Kesehatan	283.291.287,4 37,00	278.446.522,4 37,00	4.889.200,00 0,00	4.844.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.180.487,4 37,00	283.290.722,4 37,00		
1	01	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.066.984,45 1,00	33.535.615,63 1,00	1.362.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.429.484,45 1,00	33.535.615,63 1,00		
1	01	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	30.079.522,85 9,00	28.985.262,34 5,43	14.815.000,0 0	15.165.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.094.337,85 9,00	29.000.427,34 5,43		
1	01	Sosial	13.301.912,06 4,00	12.638.885,70 9,00	10.530.000,0 0	10.530.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312.442,06 4,00	12.649.415,70 9,00		
1	01	Tenaga Kerja	12.890.497,72 9,00	12.333.396,47 5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890.497,72 9,00	12.333.396,47 5,06		
1	01	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.545.640,926 ,00	6.367.166,308 ,00	205.450.100,00	205.450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751.091,026 ,00	6.572.616,408 ,00		
1	01	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.461.140,295 ,00	2.193.746,665 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.140,295 ,00	2.193.746,665 ,00		
1	01	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.130.526,68 5,00	14.927.147,20 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130.526,68 5,00	14.927.147,20 6,00		
1	01	Perhubungan	15.163.499,32 3,00	14.032.367,20 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163.499,32 3,00	14.032.367,20 9,00		
1	01	Komunikasi dan Informatika	7.935.692,510 ,00	7.422.442,037 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935.692,510 ,00	7.422.442,037 ,00		
1	01	Penanaman Modal	312.795.000,0 0	378.795.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.795.000,0 0	378.795.000,0 0		

Kelompok Belanja														
Kode		Uraian	Operasi				Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
6		KESEHATAN												
6	07 1	02 Kesehatan	91.274.649,25 7,20	89.586.209,81 0,20	16.527.045,2 00,00	16.903.175,2 00,00		0,00		0,00	0,00	0,00	107.801.694,4 57,20	106.489.385,0 10,20
6	07 2	14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.963.070.750,00	1.940.901.750,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.963.070.750,00	1.940.901.750,00
7		PARIWISATA												
7	08 3	26 Pariwisata	1.253.396.160,00	2.353.395.837,00	1.200.000,00 0,00	400.000.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.453.396.160,00	2.753.395.837,00
8		PENDIDIKAN												
8	10 1	01 Pendidikan	210.892.754,7 17,00	257.465.689,7 32,17	2.961.742,32 0,00	3.561.742,32 0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	213.854.497,0 37,00	261.027.432,0 52,17
8	10 2	19 Kepemudaan dan Olahraga	7.982.443.640,00	6.248.634.400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	7.982.443.640,00	6.248.634.400,00
8	10 2	22 Kebudayaan	3.958.990.485,00	4.538.004.190,00	1.068.000,00 0,00	1.080.000,00 0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5.026.990.485,00	5.618.004.190,00
8	10 2	23 Perpustakaan	7.842.404.820,00	6.778.604.820,00	1.282.128,00 0,00	1.345.928,00 0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	9.124.532.820,00	8.124.532.820,00
9		PERLINDUNGAN SOSIAL												
9	11 1	06 Sosial	7.834.238.060,00	7.809.021.298,40	353.027.750,00	343.076.125,00		0,00		0,00	0,00	0,00	8.187.265.810,00	8.152.097.423,40
9	11 2	08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.648.210.419,00	4.336.197.599,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3.648.210.419,00	4.336.197.599,00
9	11 3	32 Transmigrasi	188.891.150,00	188.891.150,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	188.891.150,00	188.891.150,00
		TOTAL	2.147.048.958.843,69	2.477.917.945.705,23	471.386.467.634,00	326.705.259.477,00	9.206.362.926,31	1.500.000.000,00	138.283.282.000,00	127.283.282.000,00	2.765.925.071.404,00	2.933.406.487.182,23		

Provinsi Papua, 20 Oktober 2025

Gubernur


MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H.
KOMJEN POL (Purn)



PROVINSI PAPUA

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

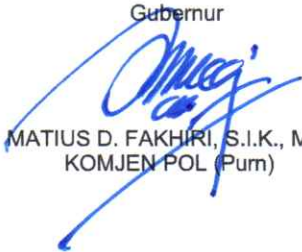
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	499.827.000,00	395.827.000,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.033.962.950,00	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	0,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.500.000.000,00	2.533.962.876,00
Total			3.033.789.950,00	2.929.789.876,00
2.	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	99.944.260,00	199.944.260,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	99.999.000,00	0,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.248.416.690,00	3.903.353.288,17
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	299.967.270,00	228.267.270,00
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	3.123.968.288,00	3.000.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	199.993.805,00	153.318.805,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	1.979.999.945,00	1.940.419.945,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
Total			11.552.289.258,00	9.928.303.568,17
3.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	199.998.160,00	159.318.160,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	2.952.464.278,00	3.001.525.000,00
Total			3.152.462.438,00	3.160.843.160,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			17.738.541.646,00	16.018.936.604,17
B SPM Bidang Kesehatan				
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.274.885.486,20	247.262.500,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0,00	0,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	139.995.000,00	139.995.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	50.000.000,00	0,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0,00	0,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0,00	0,00
		Pemulasaraan	120.000.000,00	120.000.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	0,00	0,00
		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	168.133.000,00	168.133.000,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	49.998.320,00	49.998.320,00
		Penyediaan Permakanan	1.149.750.000,00	1.149.750.000,00
		Penyediaan Sandang	164.643.925,00	164.643.925,00
		Total		1.842.520.245,00
4.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	225.896.550,00	171.893.250,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	353.125.000,00	353.125.000,00
		Penyediaan Permakanan	920.969.000,00	920.969.000,00
		Penyediaan Sandang	0,00	0,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0,00	0,00
Total		1.499.990.550,00	1.445.987.250,00	
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			5.599.602.523,00	5.295.204.598,00

Provinsi Papua, 20 Oktober 2025

Gubernur



MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H.
KOMJEN POL (Purn)



PROVINSI PAPUA

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	13.143.422.000,00	14.212.202.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	3.518.106.900,00	2.059.476.900,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	199.992.000,00	195.672.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	0,00	3.533.603.520,00	3.109.064.720,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0,00	1.349.192.335,00	1.209.287.875,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	4.001.615.075,00	6.799.090.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	1.499.990.550,00	1.445.987.250,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	12.890.497.729,00	12.333.396.475,06
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	1.000.000.000,00	500.000.200,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	499.999.600,00	431.219.600,00
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN			
9	02		KEKHUSUSAN PAPUA			
9	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	10.842.616.506,00	12.842.506.506,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	4.414.895.000,00	4.432.490.000,00

Provinsi Papua, 20 Oktober 2025

Gubernur

MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H.
KOMJEN POL (Purn)



PROVINSI PAPUA

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran VIII : Peraturan Daerah

Nomor : 07 Tahun 2025

Tanggal : 20 Oktober 2025

Kode					Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.0.00.0.00.01.0000					DINAS PENDIDIKAN	315.850.225.692,17	315.842.708.561,17	315.842.707.561,17
1.01.0.00.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	315.850.225.692,17	315.842.708.561,17	315.842.707.561,17
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	315.850.225.692,17	315.842.708.561,17	315.842.707.561,17
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	260.591.603.083,17	260.584.192.952,17	260.584.192.952,17
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	25.731.035.995,17	25.723.625.995,17	25.720.125.995,17
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.283.000.000,00	2.283.000.000,00	2.283.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	560.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	0,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.430.273.651,00	1.430.273.651,00	1.426.773.651,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	1.940.419.945,00	1.940.419.945,00	1.940.419.945,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	3.001.525.000,00	3.001.525.000,00	3.001.525.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	4.034.000.000,00	4.031.460.000,00	4.031.460.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	153.318.805,00	153.318.805,00	153.318.805,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	228.267.270,00	228.267.270,00	228.267.270,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	395.827.000,00	395.827.000,00	395.827.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Facilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	0,00	0,00	0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	159.318.160,00	159.318.160,00	159.318.160,00

Kode					Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
9.02.0.00.0.00.01.0000	9	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.000.000,00	1.030.750.000,00	1.030.750.000,00
9.02.0.00.0.00.01.0000	9	02	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
9.02.0.00.0.00.01.0000	9	02	01	1.09	0005 Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
9.02.0.00.0.00.01.0000	9	02	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
9.02.0.00.0.00.01.0000	9	02	01	1.09	0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	740.000.000,00	930.750.000,00	930.750.000,00
9.02.0.00.0.00.01.0000	9	02	01	1.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
9.02.0.00.0.00.01.0000	9	02	01	1.09	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
9.02.0.00.0.00.01.0000	9	02	01	1.09	0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
TOTAL						2.900.802.960.733,78	2.933.406.487.182,23	2.933.406.487.182,23

Provinsi Papua, 20 Oktober 2025

Gubernur


MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H.
KOMJEN POL (Purn)



PROVINSI PAPUA
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD										Jumlah	
				Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer					
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	Membangun dari dasar dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERASAMA	525.580.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.580.720,00	0,00		
2	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perjudian.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	11.981.732.000,00	0,00	156.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.148.727.000,00	0,00		
3	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perjudian.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	975.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00		
TOTAL				13.492.312.720,00	0,00	181.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.674.307.720,00	0,00		

Provinsi Papua, 20 Oktober 2025

Gubernur

MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H.
KOMJEN POL (Purn)

PROVINSI PAPUA
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	1	-	-	-	-	1	-	2
Golongan IV/d	-	17	-	-	-	12	-	29
Golongan IV/c	-	10	2	-	-	36	5	53
Golongan IV/b	-	3	66	5	-	132	59	265
Golongan IV/a	-	-	66	76	-	131	267	540
JUMLAH GOLONGAN IV	1	30	134	81	-	312	331	889
Golongan III/d	-	-	22	175	-	218	871	1.286
Golongan III/c	-	-	6	80	-	177	554	817
Golongan III/b	-	-	1	8	-	284	749	1.042
Golongan III/a	-	-	-	-	-	170	1.169	1.339
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	29	263	-	849	3.343	4.484
Golongan II/d	-	-	-	-	-	118	295	413
Golongan II/c	-	-	-	-	-	59	629	688
Golongan II/b	-	-	-	-	-	16	115	131
Golongan II/a	-	-	-	-	-	14	1.583	1.597
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	207	2.622	2.829
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	14	14
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	13	13
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	5	5
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	1	1
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	33	33
TOTAL	1	30	163	344	-	1.368	6.329	8.235

GUVERNUR PAPUA,

MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H
KOMJEN. POL (Purn)

DAFTAR PIUTANG DAERAH

Lampiran XI : PERDA Perubahan APBD TA.2025
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

PROVINSI PAPUA
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian rincian piutang	Tahun pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	1 Piutang Pajak		Rp. 1.710.441.101,00	Rp. 418.028.702,00	Rp. 888.151.200,00	Rp. 1.240.318.603,00
	a. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2023	Rp. 1.654.208.401,00	Rp. 1.467.000,00	Rp. 883.762.900,00	Rp. 771.912.501,00
	b. Piutang Pajak BBN-KB	2023	Rp. 55.674.700,00	Rp. (51.147.600,00)	Rp. 3.830.300,00	Rp. 696.800,00
	c. Piutang Retribusi Jasa Umum	2023	Rp. 558.000,00	Rp. 460.371.302,00	Rp. 558.000,00	Rp. 460.371.302,00
	d. Piutang Retribusi Jasa Usaha	2023	Rp. -	Rp. 7.338.000,00	Rp. -	Rp. 7.338.000,00
2	2 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2023	Rp. -	Rp. 55.850.209.546,00	Rp. -	Rp. 55.382.500.244,00
3	3 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	2023	Rp. 25.897.998.156,89	Rp. 19.393.632.493,68	Rp. 13.964.556.889,23	Rp. 31.327.073.761,34
4	4 Beban Dibayar Dimuka	2023	Rp. 1.308.161.509,60	Rp. 169.172.307,90	Rp. 1.237.682.713,43	Rp. 239.651.104,07
5	5 Piutang Lainnya	2023	Rp. 9.273.326.373,96	Rp. 2.584.672.556,58	Rp. 5.552.640.930,54	Rp. 6.305.358.000,00
Jumlah			Rp. 38.189.927.141,45	Rp. 78.415.715.606,16	Rp. 21.643.031.733,20	Rp. 94.494.901.712,41

GUVERNUR PAPUA,

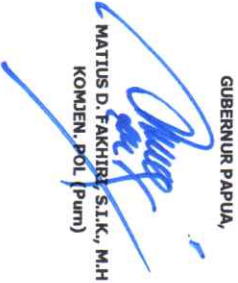
MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H
KOMJEN. POL (Purn)

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

Lampiran XII : PERDA Perubahan APBD TA.2025
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

PROVINSI PAPUA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Tahun penyertaan modal	Nama Badan /Lembaga /Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disebutkan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disebutkan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disebutkan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kemballi tahun ini	Jumlah sisa modal (Investasi) yang disebutkan sampai dengan tahun ini
1.	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12	13=9-12
1.	2003 s.d 2023	PT. Bank Papua	Perda No.2 Tahun 2002	Saham	Rp. 1.025.097.635.171,01	Rp. 985.097.635.171,01	Rp. 40.000.000.000,00	Rp. 1.025.097.635.171,01	-	Rp. -	Rp. 55.382.500.244,00	Rp. 969.715.134.927,01
2.	s.d 2021	PDAM Kab. Jayapura	-	Saham	Rp. 15.457.858.550,00	Rp. 15.457.858.550,00	-	Rp. 15.457.858.550,00	-	Rp. -	-	Rp. 15.457.858.550,00
3.	s.d 2021	PD. Irian Bhakti	Perda No.5 Tahun 1986	Saham	Rp. 102.512.455.274,92	Rp. 102.512.455.274,92	-	Rp. 102.512.455.274,92	-	Rp. -	Rp. -	Rp. 102.512.455.274,92
4.	s.d 2021	PT. TV Mandiri Papua	-	Saham	Rp. -	Rp. -	-	Rp. -	-	Rp. -	Rp. -	-
5.	s.d 2021	PT. Papua Sejahtera Rakyat (Holding Company)	Perda No.2 Tahun 2012	Saham	Rp. 214.870.519.122,70	Rp. 218.217.374.892,70	Rp. (3.346.855.770,00)	Rp. 214.870.519.122,70	-	Rp. -	Rp. -	Rp. 214.870.519.122,70
6.	s.d 2021	PT. Asuransi Bangun Askrda	-	Saham	Rp. 25.000.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	-	Rp. 25.000.000,00	-	Rp. -	Rp. -	Rp. 25.000.000,00
7.	2014 s.d 2021	PT. Jaminan Kredit Daerah	Perda No.26 Tahun 2013	Saham	Rp. 76.279.408.809,33	Rp. 72.877.601.764,33	Rp. 3.401.807.045,00	Rp. 76.279.408.809,33	-	Rp. 1.953.436.140,00	Rp. 400.000.000,00	Rp. 75.879.408.809,33
8.	2023	PT. Papua Divestasi Mandiri	Perda No.01 Tahun 2020	Saham	Rp. 314.735.548,80	Rp. 600.000.000,00	Rp. (285.264.451,20)	Rp. 314.735.548,80	-	Rp. -	Rp. -	Rp. 314.735.548,80
JUMLAH					Rp. 1.434.242.876.927,96	Rp. 1.394.787.925.652,96	Rp. 39.769.686.823,80	Rp. 1.434.557.612.476,76	-	Rp. 1.953.436.140,00	Rp. -	Rp. 1.378.775.112.232,76

GOVERNUR PAPUA,

MATIUS D. FAKHIRI S.I.K., M.H
KOMJEN. POL. (Purn)

PROVINSI PAPUA

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode			Jumlah Anggaran TAHUN n-1		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)TA n	
				APBD TA n-1	PERUBAHAN APBD TA n-1		INDUK	PERUBAHAN APBD
1	2			4	5	6	7	8
1			3	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2								
3								
4								
dst								
Jumlah				Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

GOVERNOR PAPUA,



MATUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H
KOMJEN. POL (Purn)

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

Lampiran XV : PERDA Perubahan APBD TA.2025

Nomor : 07 Tahun 2025

Tanggal : 20 Oktober 2025

PROVINSI PAPUA
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari kas daerah (Rp)	Rencana Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cadangan Umum	Perda No.5 Tahun 2014	Rp -	Rp 453.016.281.601,00	Rp 109.486.677.358,00	Rp 392.762.442.043,00	Rp 169.740.516.916,00	Rp -
Jumlah			Rp -	Rp 453.016.281.601,00	Rp109.486.677.358,00	Rp 392.762.442.043,00	Rp 169.740.516.916,00	Rp -

GUVERNUR PAPUA,

MATIUS D. FAKHIRI S.I.K., M.H
KOMJEN. POL (Purn)